

ABSTRAK

Penerimaan perpajakan merupakan sumber terbesar bagi pendapatan negara. Salah satu penerimaan perpajakan yaitu Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, instansi pemerintah dan lembaga negara lainnya berkaitan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Pajak Pertambahan Nilai yaitu pajak atas konsumsi dalam negeri Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan di daerah Pabean. Komite Olahraga Nasional Indonesia merupakan organisasi keolahragaan yang pengeluarannya dibiayai oleh APBD, sehingga harus melaksanakan kewajibannya terkait Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai ketika melakukan transaksi pembelian barang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme pemungutan, penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai pada KONI Kota Bukittinggi, kesesuaiannya menurut ketentuan perpajakan yang berlaku, kendala yang dihadapi serta solusi dalam mengatasi kendala tersebut. Analisis yang dilakukan merupakan analisis kualitatif menggunakan data primer dan sekunder yang didapatkan melalui wawancara, dan observasi selama di lapangan serta studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, penghitungan, dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 pada KONI Kota Bukittinggi dilakukan oleh CABOR, sedangkan untuk pelaporannya oleh dilakukan oleh KONI Kota Bukittinggi. Pada pemungutan, penghitungan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 banyak transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan untuk pemungutan, penghitungan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. KONI Kota Bukittinggi mengalami beberapa kendala yaitu terdapat beberapa CABOR yang tidak memungut dan menghitung Pajak Penghasilan Pasal 22, tidak menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan terlambat menyetorkan pajak. Kendala tersebut diatasi dengan solusi yaitu mengingatkan CABOR, surat pernyataan Tanggungjawab dan bimbingan kepada CABOR.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Pertambahan Nilai, KONI, CABOR

ABSTRACT

Tax revenue is the largest source of state revenue. One of the tax revenues is Income Tax Article 22 and Value Added Tax. Article 22 Income Tax is a tax levied by government treasurers, government agencies and other state institutions in relation to payment for the delivery of goods. Value Added Tax is a tax on domestic consumption of Taxable Goods (BKP) and or Taxable Services (JKP) which is carried out in the Customs area. The Indonesian National Sports Committee is a sports organization whose expenses are financed by the APBD, so it must carry out its obligations related to Article 22 Income Tax and Value Added Tax when making purchases of goods. Therefore, this study aims to explain the mechanism for calculating, collecting, depositing, and reporting Income Tax Article 22 and Value Added Tax at KONI Bukittinggi, their suitability according to the applicable tax provisions, the obstacles faced and solutions to overcome these obstacles. The analysis is a qualitative analysis using primary and secondary data obtained through interviews, field observations and literature studies. Based on the results of the research, calculation, and payment of Article 22 Income Tax at the KONI of the City of Bukittinggi, it is carried out by CABOR, while the reporting is carried out by the KONI of the City of Bukittinggi. In the calculation, collection and deposit of Income Tax Article 22, there are many transactions that are not in accordance with the applicable provisions, while for the calculation, collection and deposit of Value Added Tax, it is in accordance with the applicable provisions. The reporting of Income Tax Article 22 and Value Added Tax is in accordance with the applicable provisions. KONI Bukittinggi City experienced several obstacles, namely there were several CABOR that did not collect and calculate Article 22 Income Tax, did not deposit Article 22 Income Tax and were late in depositing taxes. These obstacles were overcome by solutions, namely reminding CABOR, a statement of responsibility and guidance to CABOR.

Keywords : Income Tax Article 22, Value Added Tax, KONI, CABOR